

---

## IKRAR LAMTEH DAN PERGURUAN TINGGI ISLAM DI KOPELMA DARUSSALAM

**Inayatillah**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia  
Email Kontributor: inayatillah@staindirundeng.ac.id

### Abstrak

---

Salah satu hasil nyata dalam pelaksanaan butir dari Ikrar Lamteh adalah berdirinya kompleks pendidikan Darussalam dengan dua perguruan tinggi Islam dan satu perguruan tinggi umum. Artikel ini kemudian akan mengkaji aspek peran ikrar lamteh dan bagaimana pembangunan ketiga perguruan tinggi di kompleks pendidikan tersebut. Menggunakan metode deskriptif analitik atas literatur sejarah ditemukan beberapa hasil penelitian diantaranya. *Pertama*, poin pokok Ikrar Lamteh mengenai agama, pembangunan dan kemakmuran memiliki satu nafas yang sama dalam pembangunan pendidikan. *Kedua*, Darussalam menjadi capaian legendaris dari satu ikrar yang sampai saat ini mewarnai sendi kehidupan masyarakat Aceh. *Ketiga*, perguruan tinggi Islam di Darussalam menjadi "jantung hati" sekaligus menjadi bagian penanda bangsa Aceh dalam kancah global. Keempat, ada 2 perguruan tinggi Islam yang berkembang di Kopelma Darussalam pasca Ikrar Lamteh yaitu UIN Ar Raniry dan Sekolah Tinggi Agama Islam Teungku Chik Pante Kulu.

**Kata kunci:** Perguruan Tinggi Islam, Ikrar Lamteh, Kopelma Darussalam.

---

### Abstract

---

One of the tangible results of implementing the points of the Lamteh Pledge is the establishment of a Darussalam education complex with two Islamic universities and one public university. This article will then examine aspects of the role of the lamteh pledge and how the development of the three universities in the education complex will be. Using the descriptive-analytic method on historical literature found several research results including. First, the main point of the Lamteh Pledge regarding religion, development, and prosperity has the same breath in education development. Second, Darussalam is a legendary achievement from a pledge that has so far revealed the joints of Acehnese people's lives. Third, Islamic universities in Darussalam have become the "heart of the heart" as well as being part of the marker of the Acehnese nation in the global arena. Fourth, there are 2 religious universities that developed in Kopelma Darussalam after the lamteh pledge, namely UIN Ar Raniry and the Teungku Chik Pante Kulu Islamic College.

**Keywords:** Islamic College, Pledge Lamteh, Kopelma Darussalam

---

## A. PENDAHULUAN

Sistem pendidikan Islam adalah sistem yang berdasarkan pada agama Islam dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Aceh. Karena itu, sistem itu dipandang sangat cocok untuk masyarakat Aceh yang beragama Islam. Islam adalah jati diri masyarakat Aceh dimana bagi masyarakat, berbagai aspek kehidupan seperti adat, budaya dan peradaban tidak bisa dipisahkan dengan ajaran Islam. Ungkapan yang merupakan filsafat masyarakat Aceh adalah *hukom ngon adat lage zat ngon sifeut*. Hubungan antara hukum (syariat Islam) dan adat adalah seperti zat dan sifat dimana keduanya tidak bisa dipisahkan (Soelaiman, 2016). Nafas Islam begitu menyatu dalam adat budaya Aceh sehingga aktifitas budaya kerap berazaskan Islam (Berutu, 2016).

Pendidikan islami sendiri bertujuan memadukan dan menyempurnakan keimanan dan amal saleh untuk tercapainya kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Dengan tujuan demikian, pendidikan Islami bukan semata-mata menekankan pada aspek jasmaniyah, akal dan moral saja, tapi juga menekankan pentingnya ubudiyah dan amal saleh yang semua itu berkembang secara seimbang (Soelaiman, 2016).

Sejarah perkembangan pendidikan tinggi Islam di Aceh erat kaitannya dengan peristiwa pascakemerdekaan di Indonesia. Ikrar Lamteh sebagai bagian dari peristiwa penting tersebut telah membawa akibat yang besar bagi sejarah pendidikan di Aceh. Dengan satu tekad dan tujuan yang nyata, Ikrar Lamteh adalah ujung tonggak dari perkembangan salah satu pusat pendidikan tinggi terbesar di Aceh. Dengan kata lain, Ikrar Lamteh telah melahirkan Komplek Pelajar dan Mahasiswa (Kopelma) Darussalam di Banda Aceh.

Rahmad Syah Putra Dkk (2020) dalam artikel mereka menyebutkan bahwa pembangunan Darussalam tersebut bertujuan untuk mencerdaskan generasi bangsa Aceh pasca perang yang berkepanjangan. Kemudian terdapat 4 (empat) Konsepsi Ideal Kopelma Darussalam menurut Perspektif A. Hasjmy diantaranya ialah 1) Darussalam sebagai Kampus Model; 2) Darussalam sebagai Simbol Damai; 3) Darussalam Merupakan *Character Building*; dan 4) Darussalam sebagai Kampus Ilmu. Melalui keempat konsepsi itu diharapkan Darussalam menjadi pusat kajian dan rujukan serta mampu memecahkan segala permasalahan di Aceh, serta sebagai tempat menggali ilmu pengetahuan untuk dapat disumbangkan kepada umat manusia, serta dapat berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan Aceh yang bermartabat.

Kopelma Darussalam telah berkembang secara pesat. Di dalam Kopelma terdapat tiga perguruan tinggi yaitu Universitas Syah Kuala sebagai perguruan Tinggi Umum dan dua perguruan tinggi agama Islam yaitu (IAIN sekarang UIN Ar Raniry) dan Perguruan Islam Teungku Chik Pante Kulu.

Hadirnya dua perguruan tinggi Islam menunjukkan pengaruh Ikrar Lamteh tidak dapat dikatakan kecil bagi perkembangan pendidikan tinggi keislaman di Aceh. Begitupun kehadiran komplek Darussalam, juga melahirkan begitu banyak kader ulama dan cendikia yang telah menjadi tokoh-tokoh kunci dalam pembangunan Aceh. Dengan demikian, tulisan ini menjadi menarik untuk dikembangkan karena sangat sedikit tulisan yang mengkaji mengenai pengaruh Ikrar Lamteh bagi perkembangan keilmuan di Aceh.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitik. Dalam hal ini, penulis akan melakukan deskripsi atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Metode yang digunakan adalah studi atas literatur sejarah dengan mengumpulkan sumber data yang relevan dengan judul pembahasan. Penelitian yang menggunakan dua macam sumber data yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah literatur tentang Ikrar Lamteh yang didukung dengan data sekunder sebagai pelengkap. Tujuan penelitian ini adalah menemukan pengaruh ikrar Lamteh dalam perkembangan keilmuan khususnya perguruan tinggi keagamaan di Kopelma Darussalam.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sekilas Tentang Ikrar Lamteh**

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia belum mendapat pengakuan dari Belanda. Pada akhir tahun 1948, Belanda kembali mencoba menguasai Indonesia. Salah satu percobaan tersebut juga dilakukan di Aceh. Namun, daerah tersebut tidak berhasil diduduki. Bahkan Aceh telah berusaha mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia dengan pasukan yang datang ke Medan untuk melawan agresi Belanda yang dikenal dengan Perang Medan Area (Usman, 2001).

Setelah perjuangan mempertahankan kemerdekaan berakhir, pada penghujung 1949, ketika banyak daerah lain yang mengalami proses peredaan ketegangan dan penataan para pejuang kemerdekaan, Aceh belum selesai dengan persoalannya. Persoalan yang muncul berbarengan dengan berakhirnya perang kemerdekaan adalah persetujuan dengan Jakarta terkait kedudukan Aceh dalam Negara Republik Indonesia.

Nazaruddin Syamsuddin dalam Usman (2001) menyebutkan Aceh selama masa revolusi memainkan peranan besar sebagai salah satu sentral perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sehingga Presiden Soekarno memberi gelaran sebagai “daerah modal”, peranannya justru diperkecil setelah kemerdekaan Indonesia diakui oleh dunia internasional. Aceh yang pada awal mulanya berstatus sebagai daerah militer yang dipimpin oleh gubernur militer dengan rentang kekuasaan sampai ke sebagian wilayah Sumatera Utara (Langkat dan Tanah Karo) dan kemudian menjadi provinsi sendiri justru direduksi menjadi sebuah keresidenan di lingkungan Provinsi Sumatera Utara. Aceh kehilangan peran identitas dan politik ketika tidak lagi menjadi daerah otonom tersendiri. Justru ketika digabung dengan Sumatera Utara, Aceh dapat hilang dari kancah perpolitikan nasional maupun global.

Tidak sampai tiga tahun setelah peleburan, pada awal 1951, meletuslah pemberontakan Darul Islam pada bulan September 1953. Pemberontakan ini dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh yang pada masa revolusi pernah menjadi gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo. Tentu saja alasan kemunculan pemberontakan Darul Islam di Aceh lebih kompleks daripada hanya faktor pengecilan status serta peranan Aceh dan para pemimpinnya di republik yang baru merdeka itu. Akan tetapi pemerintah pusat tidak pernah benar-benar dapat memahami penyebabnya. Sekalipun pada tahun 1962 Jakarta terpaksa memberi konsesi politik yang amat besar, berupa penetapan Aceh sebagai Daerah Istimewa, demi mengakhiri perlawanan Daud Beureueh (Usman, 2001).

Setelah provinsi Aceh kedua terbentuk dilangsungkan pertemuan antara Gubernur Aceh Ali Hasjmy dan komandan Resimen I Mayor Syammaun Gaharu dengan kepala staf Angkatan Darat Kolonel A.H. Nasution yang membahas permasalahan sekitar persoalan pemulihan keamanan dan pembangunan serta langkah-langkah yang perlu ditempuh selanjutnya. Setelah mempelajari situasi dan keadaan Aceh pada saat itu maka demi untuk keamanan dan kemakmuran Daerah Aceh, diambil suatu kesimpulan untuk menjadikan daerah ini “dalam keadaan bahaya” sebagai alat dan jembatan untuk mencapai tujuan keamanan dan terciptanya pembangunan di daerah (Penyusun, 1969).

Langkah pertama yang diambil ialah mengadakan pertemuan dengan para pemimpin DI/TII pada bulan April 1957 di Lamteh. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bersama yang dikenal sebagai Ikrar Lamteh. Pada intinya ikrar Lamteh ini mengandung 3 prinsip pokok yang isinya diantara lain, *Pertama*, sama-sama berusaha untuk memajukan Agama Islam; *Kedua*, sama-sama berikhtiar untuk membangun Aceh dalam arti yang seluas-luasnya; Dan *ketiga*, Sama-sama bekerja untuk memberi kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyat dan masyarakat Aceh (Penyusun, 1969).

Ikrar Lamteh mengakhiri pemberontakan Aceh. tetapi, kelompok garis keras dalam tubuh DI/TII, yang dipimpin Beureueh, memandang bahwa Aceh mengingat sejarah dan jasa-jasa kepada RI- haruslah menjadi provinsi yang diberi otonomi yang luas yang memungkinkan pemberlakuan syariat Islam (Muhajir, 2016). Ikrar Lamteh sendiri juga sering disalahfahami sebagai sebuah ikrar yang tidak berdampak berarti apa-apa. Padahal jelas, Ikrar Lamteh menjadi pemandu sejarah pendidikan di Aceh dan berkontribusi bagi kemajuan pendidikan di Indonesia, tak terkecuali pendidikan tinggi keislaman.

Menurut Muhammad Alkaf (2019), Ikrar Lamteh adalah sebuah sketsa sejarah yang membentuk kesadaran orang Aceh. Kesadaran untuk bangkit dari keterpurukan akibat perang kolonial, revolusi nasional dan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat Aceh. Perang yang terus menerus memakan biaya yang tidak sedikit. Lalu pemimpin Aceh ketika itu hendak keluar dari segala keterpurukan dan diwacanakan untuk membangun Kota Pelajar dan Mahasiswa (Kopelma) Darussalam, setelah ikrar lamteh disepakati.

Alkaf menjelaskan, Keberadaan Darussalam menjadi penting dalam memberikan gambaran sejauh mana Ikrar Lamteh menjiwalkannya. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Prijanto, pada peletakan batu pertama pembangunan Kota Darussalam sebagai berikut: Untuk kita, nama adalah makna. Menurut saya, nama Darussalam untuk kota pelajar adalah baik sekali. Kalau saja tidak salah, Darussalam sebagai lawan Darul Harb (daerah peperangan). Darussalam artinya suatu daerah atau tempat kedamaian, tempat aman, tempat-tempat yang tentram (Alkaf, 2019).

Dengan adanya dukungan penuh dari segenap lapisan masyarakat, pemerintah dan penguasa perang maka diwujudkan pembangunan di Aceh dalam beberapa bidang. Pembangunan di bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya berlangsung secara cepat. Imbas paling monumental dari pembangunan ini adalah berdirinya dua perguruan tinggi negeri di Aceh yaitu Universitas Syahkuala (sekarang USK) dan IAIN Ar-Raniry yang terletak berdekatan dalam satu kawasan yang dikenal dengan Kopelma Darussalam.

Selain itu, sebagai imbas dari komitmen pengembangan pembangunan Islam di Darussalam, didirikan Dayah Teungku Chik Pante Kulu yang kemudian berkembang menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Teungku Chik Pante Kulu. Tulisan ini kemudian hadir untuk memberikan gambaran mengenai peran dari Ikrar Lamteh dalam pengembangan kompleks pendidikan terbesar di Aceh yaitu Kopelma Darussalam, lebih khusus peran pengembangan pendidikan tinggi Islam di UIN Ar Raniry dan Sekolah Tinggi Agama Islam Chik Pante Kulu.

## **2. Kopelma Darussalam**

Setelah konflik pasca pemberontakan DI/TII keadaan Aceh semakin tertinggal dari daerah lain di Indonesia. Ali Hasjimy yang menjabat sebagai Gubernur Aceh bercita-cita bahwa Aceh harus dibangun kembali dan mengejar ketertinggalannya. Untuk itu, demi cita-cita yang demikian, bersama tokoh masyarakat Aceh di Banda Aceh, bersama-sama melahirkan Kopelma Darussalam. Pembangunan kompleks pendidikan didasarkan pada pemikiran yang sangat sederhana, bahwa jika hendak membangun suatu daerah maka yang pertama sekali perlu dibangun adalah pendidikannya. Keyakinan bahwa suatu bangsa dapat maju dilihat dari pendidikannya merupakan keyakinan yang universal (Hasballah, 1978). Konsep Kopelma Darussalam dikemukakan oleh Ali Hasjmy dalam Adil (2019) bermaksud menjadikan Kopelma Darussalam sebagai simbol perdamaian, tempat untuk membangun ilmu untuk kemanusiaan dan simbol atas runtuhnya sekularisme pendidikan dan dikotomi ilmu di Aceh.

Menurut Muhammad Alkaf, pendirian kopelma Darussalam merupakan cita-cita kelompok intelegensia Aceh yang tertunda, akibat terus menerus berada dalam keadaan perang yang tak berkesudahan. Selain itu pula, pendirian Darussalam merupakan sebuah kerja besar untuk membangun Aceh yang hancur akibat perang semenjak zaman kolonial.

Dalam sebuah kesempatan Ali Hasjimi menyampaikan:

Cita-cita yang terkandung dalam dada pemimpin dan rakyat Aceh dengan membangun “Darussalam” adalah karena dorongan dan kesadaran hendak menjadikan hari depan Aceh, selaku bagian dari republik Indonesia, kembali megah dan berbahagia seperti zaman-zaman kebesaran dulu, dengan tujuan bahwa disamping akan menjadi sebuah mata air ilmu pengetahuan, “Darussalam,” juga merupakan lembaga, dimana manusia-manusia yang baru yang berjiwa besar, berbudi luhur, dan berpengalaman luas dilahirkan (Alkaf, 2019).

Soekarno dalam satu kesempatan juga menyebutkan bahwa kota pelajar dan mahasiswa Darussalam sebagai pusat pendidikan di Aceh, menjadi lambang iklim damai, suasana persatuan dan kesatuan, sebagai hasil kerjasama antara rakyat dan para pemimpin Aceh, sebagai modal pembangunan dan kemajuan bagi daerah Aceh khususnya dan bagi seluruh Indonesia pada umumnya (Alkaf, 2019).

Dalam kesempatan yang berbeda, Ali Hasjimy menjelaskan tentang tujuan Kopelma Darussalam adalah membangun manusia pancasila yang berjiwa besar, memiliki pengetahuan yang luas serta berakhlak mulia. Maka demikian, Kopelma Darussalam diharapkan dapat membangun manusia yang berketuhanan yang maha esa, berperikemanusiaan, kebangsaan Indonesia, berfaham kerakyatan, berkeadilan sosial, berjiwa besar, berpengalaman luas dan berakhlak mulia. Darussalam adalah masa depan Aceh yang gemilang (Alkaf, 2019).

Pembangunan Kopelma ini didasarkan pada harapan rakyat untuk memiliki daya saing bersama daerah lain, sehingga pada 17 Agustus 1959 diletakkan batu pertama. Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Menteri Agama K.H. Muhammad Ilyas meresmikan sebuah kompleks bangunan pendidikan yang saat itu dikenal sebagai Kopelma di Daerah Darussalam. Wilayah ini sendiri dulunya merupakan hutan belantara dan semak belukar yang awalnya diduga merupakan milik Erfpacht NV. Kopelma Darussalam terletak di Kecamatan Darussalam sekitar 7 kilo meter di luar Banda Aceh. Panitia kemudian mengkaji secara lebih mendalam dan menghadirkan bukti-bukti. Akhirnya diketahui bahwa tanah tersebut merupakan milik Teuku Nyak Arief statusnya disewa oleh Erfpacht NV (Hasballah, 1978).

Kopelma Darussalam saat ini telah berdiri 3 lembaga pendidikan yaitu Universitas Syiah Kuala sebagai lembaga pendidikan tinggi untuk ilmu pengetahuan umum dan Institut Agama Islam Negeri sebagai lembaga khusus yang berorientasi pada pendidikan agama Islam yang utuh, dan sebuah Pesantren Tinggi Dayah Teungku Cik Pantee Kulu sebagai lembaga pendidikan untuk memperdalam ilmu agama Islam (Hasballah, 1978). Pengaruh Kopelma Darussalam kemudian merambah ke sekelilingnya dengan berdirinya beberapa perguruan tinggi yaitu Akademi Keperawatan Tjoet Nya' Dhien, STKIP Bina Bangsa Getsempena dan STAI Al Washliyah.

Saat ini, Kota Pelajar dan Mahasiswa (Kopelma) Darussalam memiliki luas total yaitu 207,35 Ha dengan luas daratan 193,50 Ha dan luas saluran 13,85 Ha. Kopelma Darussalam terdiri atas lima dusun yaitu dusun Timur, Barat, Selatan, Utara, dan Sederhana. Dilihat dari segi perbatasan wilayah, sebelah timur berbatasan dengan Gampong Tungkop Kabupaten Aceh besar. Sebelah barat berbatasan dengan Krueng (Sungai) Aceh. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Limpok dan Gampong Berabung yang berada di Kabupaten Aceh Besar. Dan sebelah utara berbatasan dengan Gampong Rukoh dan Gampong Tanjung Selamat (Rezki et al., 2017).

Kemajuan Kopelma sudah tampak terlihat sejak didirikan hingga saat ini. Komplek tersebut selalu ramai karena didatangi oleh ribuan mahasiswa dari berbagai penjuru Aceh, Indonesia dan dunia. Kegiatan akademik menjadi ciri khas bagi komplek Darussalam. Ekonomi masyarakat sekitar juga mengeliat karena dampak positif dari kebutuhan mahasiswa yang berdatangan.

Di komplek Kopelma Darussalam dan sekitarnya, tumbuh pesat berbagai bangunan seperti kost-kostan, penginapan (hotel), pusat perbelanjaan, klinik dan rumah sakit, rumah makan, toko-toko buku dan café serta warung kopi tempat mahasiswa melaksanakan kegiatan dan menyelesaikan tugas-tugas akademik. Kopelma Darussalam merupakan salah satu titik keramaian di Banda Aceh selain yang terdapat di pusat kota.

### **3. Pendidikan Tinggi Islam UIN Ar Raniry**

Riwayat perkembangan perguruan tinggi Islam di Aceh memiliki keterkaitan dengan sejarah perkembangan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia. Perkembangan ini berkaitan dengan cita-cita umat Islam Indonesia untuk memiliki Perguruan Tinggi Islam serta berkait rapat dengan maksud pemerintah untuk mengembangkan model Perguruan Tinggi Islam Negeri.

Pada masa penjajahan Belanda, madrasah-madrasah di Indonesia sudah mengalami kemajuan yang pesat. Meskipun madrasah-madrasah itu maju pesat, tetapi masih berkisar pada peringkat menengah dan belum sampai ke tingkat perguruan tinggi. Sebenarnya sudah ada keinginan di kalangan umat Islam untuk mendirikan Madrasah Tinggi atau Pesantren Luhur, seperti yang dilihat dari usaha Sutiman di Jawa, akan tetapi tidak berhasil (Penyusun, 1969).

Usaha Sutiman ini diteruskan oleh pemimpin-pemimpin umat Islam, sehingga pada tahun 1945 cita-cita umat Islam Indonesia terlaksana dengan berdirinya Sekolah Tinggi Islam atas inisiatif beberapa tokoh-tokoh Islam yang berada di Jakarta (Penyusun, 1969). Setelah proklamasi kemerdekaan Negara Indonesia keadaan Sekolah Tinggi Islam ikut dipengaruhi oleh suasana perang mempertahankan kemerdekaan.

Keadaan telah menyebabkan pemerintah Republik Indonesia terpaksa memindahkan ibu kota ke Yogyakarta dan dengan sendirinya Sekolah Tinggi Islam-pun turut hijrah ke Yogyakarta (Penyusun, 2003).

Kemudian institusi pendidikan ini berubah menjadi Universitas Islam yang diberi nama dengan Universitas Islam Indonesia (UII) dengan memiliki empat fakultas yaitu Fakultas Agama, Hukum, Ekonomi dan Fakultas Pendidikan (Boland, 1985). Setelah keamanan Negara Republik Indonesia pulih kembali maka dicapai suatu kesepakatan untuk menegerikan satu fakultas yang terdapat dalam UII yaitu Fakultas Agama menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (Penyusun, 2003).

Adapun maksud dan tujuan didirikannya PTAIN ialah untuk memberi pendidikan tinggi dan menjadi pusat memperkembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama Islam dan untuk tujuan tersebut diletakkan asas untuk membentuk manusia susila dan cakap serta mempunyai keinsafan bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat Indonesia dan dunia umumnya atas dasar Pancasila, kebudayaan, kebangsaan Indonesia dan kenyataan.

Disamping berdirinya PTAIN di Yogyakarta, di Jakarta terdapat Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di bawah asuhan Jabatan Pendidikan Agama Pusat. ADIA didirikan tahun 1957 yang bertujuan untuk memenuhi keperluan Jabatan Pendidikan Agama (Japenda) akan guru-guru untuk PGA Atas yang berada di bawah asuhannya dan untuk mencetak guru-guru Agama di sekolah-sekolah lanjutan di bawah asuhan Jawatan Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) (Penyusun, 1963).

Oleh kerana PTAIN yang hanya satu fakultas dan ADIA merupakan institusi semi akademi yang tidak dapat dipertahankan keberadaannya maka pada 24 Agustus 1960 kedua institusi pendidikan tersebut digabungkan dengan empat fakultas yang sudah ada yaitu dua di Yogyakarta dan dua di Jakarta. Fakultas-fakultas yang terletak di Yogyakarta adalah Fakultas Syari'ah (Hukum) dan Ushuluddin (Agama), sedangkan fakultas yang terdapat di Jakarta adalah Fakultas Tarbiyah (Pendidikan) dan Adab (Sastra) (Penyusun, 2003).

Sesudah IAIN al-Jamiah al-Islamiah al-Hukumiyah diresmikan, ia terus berkembang dengan pesat dan membuka beberapa cabang seperti Kutaraja (sekarang Banda Aceh), Banjarmasin, Palembang, Surabaya, Malang, Makassar dan Serang. Sedang pusat IAIN di Yogyakarta menambah dua fakultas baru yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Adab. Adapun cabang Jakarta membuka sebuah baru yaitu Fakultas Ushuluddin (Penyusun, 1978).

Lahirnya IAIN Jami'ah Ar-Raniry sebagai institusi Pendidikan Tinggi Agama Islam di Aceh merupakan hasil usaha serta tekad Pemerintah dan Rakyat Aceh yang sejak lama bercita-cita dan memperjuangkan adanya sebuah perguruan tinggi Islam di samping perguruan tinggi umum. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry secara resmi berdiri pada tanggal 5 Oktober 1963. Dalam sejarah pendirian IAIN di Indonesia, IAIN Ar-Raniry adalah yang ketiga setelah IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta.

Seperti dijelaskan sebelumnya, sebelum menjadi perguruan tinggi keagamaan tersendiri, telah didirikan beberapa Fakultas Syari'ah (tahun 1960) dan Fakultas Tarbiyah (tahun 1962) sebagai cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Aceh. Ditahun yang sama kemudian didirikan Fakultas Ushuluddin di Banda Aceh dengan status swasta.

Institusi pendidikan Islam yang berada di jantung kota Serambi Mekkah ini terlebih dahulu berdiri Fakultas Syariah pada tahun 1960 dan Fakultas Tarbiyah pada tahun 1962 sebagai cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Aceh. Kemudian tahun 1962 didirikan pula Fakultas Ushuluddin sebagai fakultas ketiga di Banda Aceh dengan status swasta (Penyusun, 2004).

Setelah beberapa tahun menjadi cabang dari IAIN Yogyakarta, pada tahun 1963 fakultas-fakultas tersebut berafiliasi ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekitar enam bulan dengan kedudukan demikian, barulah IAIN Ar-Raniry diresmikan, tepatnya pada tanggal 5 Oktober 1963. Dengan demikian, ketika diresmikan, IAIN Ar-Raniry telah memiliki tiga fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah, Tarbiyah dan Ushuluddin. Selanjutnya beberapa tahun kemudian bertambah dua fakultas baru, yaitu Fakultas Dakwah yang diresmikan pada tahun 1968 dan Fakultas Adab pada tahun 1983 (Penyusun, 2004).

Istilah Institusi pendidikan tinggi Islam Negeri dalam bahasa Arab disebut dengan *al-Jami'ah al-Islamiyyah al-Hukumiyyah*. Sebagaimana institut-institut lainnya, Institut Agama Islam Negeri adalah sebuah institusi pendidikan tinggi yang mengelola suatu bidang kajian dasar, yaitu bidang studi agama Islam dengan sejumlah cabang dan sub-cabang keilmuannya. Dari segi pelaksana pembelajaran, IAIN Ar-Raniry berada di bawah jajaran Kementerian Agama Republik Indonesia yang pengawasan dan pelaksanaannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam melalui Direktorat Perguruan Tinggi Islam (Penyusun, 2004).

Sebutan Ar-Raniry, dinisbahkan kepada nama belakang seorang ulama besar dan mufti Kerajaan Aceh Darussalam yang sangat berpengaruh pada masa Sultan Iskandar Tsani (1637-1641). Ulama tersebut nama lengkapnya adalah Syeikh Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid Ar-Raniry yang berasal dari Ranir (sekarang Rander) di India dan telah memberikan sumbangan besar dalam perkembangan pemikiran Islam di Nusantara pada umumnya dan Aceh pada khususnya (Daudy, 2006).

Menurut catatan Tim (1964), IAIN Ar Raniry berdiri pada tanggal 24 Agustus 1960 M atau 2 Rabiul Awal 1380 H dan Fakultas Syariah lahir pada tanggal 2 September 1960 atau 12 Rabiul Awal 1380 H yang ketika didirikan bertepatan hari pendidikan Aceh. Dekan fakultas Syari'ah Darussalam ketika didirikan adalah Prof. Tgk. Hasbi Ash Shiddiqy yang juga merangkap sebagai Dekan Fakultas Syariyah Yogyakarta. Sekretaris fakultas yang ditunjuk adalah H. Usman Jahja Tiba (Penyusun, 1963).

Pendirian ini sesuai dengan pasal 2 keputusan MPRS tanggal 3 Desember 1960 Nomor II/MPRS/1960 yang berbunyi: Pertama, menetapkan pendidikan agama sebagai mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah rakyat sampai universitas-universitas negeri. Kedua, perluasan fakultas-fakultas agama dengan perjanjian bahwa dalam tahun 1961 harus disempurnakan segala sesuatu yang telah dibentuk dalam tahun 1960. Begitupun dalam tahun 1962 di Yogyakarta harus sudah dibentuk Institut Agama Islam Negeri yang terdiri dari 4 fakultas. Terakhir, di Banda Aceh juga ditetapkan supaya harus ada 2 fakultas dan seterusnya (Penyusun, 1963).

Sejak didirikan, IAIN Ar-Raniry telah menunjukkan peranan strategiknya bagi pembangunan dan perkembangan masyarakat. Dengan misi dan melalui alumninya yang sudah merata ditemukan pada hampir seluruh agensi pemerintah dan swasta, tidak berlebihan untuk disebutkan bahwa institusi ini telah berada dan menjadi “jantung hati masyarakat Aceh” (Usman, 2001).

Dalam perkembangannya, IAIN Ar-Raniry di samping terus memantapkan institusinya juga telah membuka sejumlah fakultas dan jabatan yang sesuai dengan keperluan masyarakat. Tidak hanya itu dalam upaya menyempurnakan keberadaannya IAIN Ar-Raniry telah pula membuka Program pendidikan S-2 (Master) pada tahun 1989 dan pendidikan S-3 (Ph.D.) pada tahun 2002. Dengan tingkat pendidikan S-1 (ijazah dasar) sampai dengan S-3 dan fakultas serta kursus yang sudah dibuka, diharapkan dapat melahirkan pendidik, pemikir, dai atau ulama yang dapat memahami tanda-tanda perkembangan dan perubahan zaman (Penyusun, 2009).

Di samping itu, IAIN Ar-Raniry telah berhasil menyepakati berbagai bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan sejumlah institusi pemerintah dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri. MoU tersebut telah membuka prospek yang memiliki makna ganda yaitu membuka peluang pekerjaan bagi alumni dan beasiswa baik mahasiswa yang masih aktif kuliah maupun yang sudah alumni untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Keberhasilan yang telah dicapai dari MoU tersebut adalah keberhasilan mencetak doktor dengan jumlah yang banyak (Penyusun, 2009).

Adapun visi IAIN Ar-Raniry adalah “*Menjadi pusat perkembangan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner yang unggul dan kompetitif.*” Visi tersebut diwujudkan dalam bentuk misi “*Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman, yang memiliki keunggulan dan daya saing internasional, mengembangkan penyelidikan ilmu-ilmu keislaman, yang relevan dengan keperluan masyarakat dan mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat muslim*” (Statuta UIN Ar Raniry, 2008). Visi dan misi tersebut direalisasikan dalam bentuk program-program dan kegiatan di semua fakultas yang terdapat pada lingkungan IAIN Ar-Raniry. IAIN Ar-Raniry memiliki 5 buah fakultas, yaitu : Fakultas Adab; Fakultas Dakwah; Fakultas Syari’ah; Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin.

Selain itu, IAIN Ar-Raniry juga dilengkapi dengan pelbagai sarana, prasarana dan unit pelaksana teknis. Pada masa sekarang IAIN Ar-Raniry telah mempunyai beberapa institusi/pusat kajian samada yang bersifat struktural mahupun non struktural. Adapun institusi-institusi tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, Institusi Struktural, adalah institusi yang tugas dan fungsinya terkait langsung dengan pengembangan “Tri Dharma Perguruan Tinggi” (Rasyidah, 2008) dan pembinaan mahasiswa. Institusi yang termasuk dalam kategori institusi

struktural di lingkungan IAIN Ar-Raniry, yaitu, Pusat Komputer (PUSKOM), Perpustakaan IAIN Ar-Raniry, Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan Pusat Penelitian (Puslit).

Kedua, Institusi Non Struktural, yaitu institusi-institusi yang berfungsi sebagai institusi penunjang dalam bidang pelayanan kepada civitas akademika, pnsyarah, pekerja dan masyarakat awam. Adapun institusi yang termasuk dalam institusi non-struktural, yaitu Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, Pusat Penyelidikan, Pusat Bahasa dan Pengembangan Tenaga Pengajar, Pusat Studi Wanita, Pusat Pembinaan Kerohanian dan Kemakmuran Masjid (P2K2M) Fathun Qarib, Pusat Kajian Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Pusat Penerbitan dan Penerjemahan, Pusat Kajian dan Pelayanan Psikologi, Pusat Penyelidikan dan Pengkajian Kebudayaan Islam (P3KI), Pusat Pengembangan Madrasah dan Dayah (P2MD), Center for Conflict Resolution and Peace Studies (CCRPS), Pusat Pelayanan Kesehatan, Ikatan Alumni IAIN Ar-Raniry (KONIRY), Koperasi Pegawai, KORPRI, Dharma Wanita dan Ar-Raniry Press (Rasyidah, 2008).

Berdasarkan Perpres yang ditandatangani langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono itu, Kamis 11 Oktober 2013 dan diterima oleh Rektor Prof Dr Farid Wajdi Ibrahim MA di Kantor Sekretariat Kabinet (Setkab) Jakarta, diatur perubahan status IAIN Ar-Raniry menjadi UIN Ar-Raniry yang berkedudukan di Banda Aceh. Ketika itu, UIN Ar-Raniry merupakan UIN ketujuh setelah UIN Sunan Syarif Kasim, Riau. Adapun UIN kedelapan yang bersamaan dengan UIN Ar-Raniry ditetapkan perubahannya oleh Presiden RI adalah UIN Sunan Ampel Surabaya.

Perubahan status itu merupakan kado istimewa bagi IAIN Ar-Raniry yang baru saja memperingati hari ulang tahun emas (yang ke-50) pada 5 Oktober 2013. Di tahun tersebut IAIN Ar-Raniry berhasil meretas satu sejarah penting dalam pengembangan jati diri meningkatkan status menjadi UIN Ar-Raniry (PAN-RB, 2013)

Menurut Prof Dr. Farid Wajdi Ibrahim, selaku Rektor, setelah perubahan tersebut, dibuka empat fakultas yakni Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP), serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (PAN-RB, 2013).

#### **4. Pendidikan Tinggi Islam Teungku Chik Pante Kulu.**

Melihat proses perkembangan Sekolah Tinggi Agama Islam Teungku Chik Pante Kulu merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji dari aspek sejarah. Sekolah ini merupakan perubahan dari sistem pendidikan tinggi Islam yang berasaskan dayah tradisional menjadi sistem pendidikan Tinggi Islam yang modern. Pada masa awal berdirinya sekolah ini bernama Dayah Tgk. Chik Pante Kulu yang tujuan utama pembangunannya adalah untuk menghasilkan Ulama-ulama Islam yang sesuai dengan julukan "Warathatul Anbiya" untuk memimpin spiritual dan kepercayaan seluruh masyarakat Indonesia (Ismail et al., 1995; Penyusun, 1963).

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa dayah sudah lama menjadi sistem pendidikan dalam masyarakat Aceh yang diwarisi secara turun temurun sejak agama Islam ini mulai berkembang di kepulauan nusantara. Para alim ulama yang telah berjasa dalam menyiarkan dakwah Islamiyah dan mengembangkan ilmu pengetahuan Islam dalam

masyarakat pada masa lampau merupakan alumni dari dayah-dayah yang terdapat hampir di setiap negeri (sekarang kecamatan) di seluruh daerah Aceh.

Mengingat betapa pentingnya sistem pendidikan tradisional dayah maka sistem tersebut perlu dibina dan dilestarikan dalam lingkungan masyarakat Aceh serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dengan berlandaskan cita-cita inilah Dayah Tgk. Chik Pante Kulu didirikan dengan penuh semangat dan harapan di dalam lingkungan Kota Pelajar Mahasiswa Darussalam (Kopelma Darussalam) (Penyusun, 1969).

Rancangan pembangunan Dayah Tgk. Chik Pante Kulu mulai direalisasikan pelaksanaannya pada tahun 1962, ketika Gubernur Ali Hasjmy masih memegang kendali Pemerintah Daerah sebagai Kepala Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Aceh. Susunan panitia persiapan pembangunan dayah tinggi ini berjumlah 75 orang dan terdiri dari pelbagai kalangan dan mungkin susunan panitia ini merupakan yang terlengkap dibandingkan dengan susunan Panitia Persiapan Pembangunan Perguruan Tinggi Swasta lain di Aceh. Di antara beberapa tokoh penting yang masuk dalam barisan panitia persiapan tersebut adalah A. Muzakkir Walad, A. Hasjmy, Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba, Letnan Kolonel Nyak Adam Kamil, Prof. Drs. A. Madjid Ibrahim dan tokoh-tokoh ulama lainnya (Penyusun, 1969).

Pada masing-masing unit/ bagian persiapan pendirian Dayah Tgk. Chik Pante Kulu telah dirumuskan beberapa keputusan tentang rancangan-rancangan pokok dari institusi tersebut. Beberapa hal yang berhasil dirumuskan misalnya mengenai kurikulum pengajaran, calon pimpinan, ulama-ulama sebagai tenaga pengajar, persyaratan untuk menjadi mahasiswa (pelajar), mendirikan bangunan untuk dayah maupun asrama serta kelengkapan-kelengkapan lainnya. Pada waktu itu panitia memutuskan bahawa jumlah subjek yang harus diajarkan pada dayah tersebut sebanyak lima belas macam ilmu yang harus diselesaikan dalam masa lima tahun untuk lima tingkatan (Penyusun, 1963).

Adapun syarat-syarat minimum untuk boleh diterima menjadi mahasiswa pada Dayah Tgk. Chik Pante Kulu ialah calon-calon mahasiswa yang sudah sampai pengkajiannya pada kitab *Fathul Mu'in* atau yang setingkat dengan itu. Bagi mereka yang sudah menempuh pelajaran selama lima tahun dan dinyatakan lulus dalam ujian akhir maka dia boleh memakai gelar "ulama" sebagai gelar kesarjanaannya (Penyusun, 1969).

Sedangkan sistem organisasi yang ditetapkan oleh panitia adalah bahawa Dayah Teungku Chik Pante Kulu dipimpin oleh seorang Ulama Besar yang disebut "Teungku Chik di Dayah" dan dibantu oleh beberapa "Teungku di Bale" yang merupakan staf pengajar atau majlis guru. Selanjutnya untuk kepentingan dan kelancaran ilmu pengetahuan, dayah itu dilengkapi pula dengan sebuah Kutub-Khanah (Perpustakaan) yang lengkap dengan kitab-kitab dan buku-buku yang diperlukan, terutama kitab-kitab berbahasa Arab (Penyusun, 1969).

Berkat bantuan seluruh pihak dan masyarakat Aceh, maka pada tanggal 31 Agustus 1968 Presiden Republik Indonesia Soeharto meresmikan pendirian Dayah Teungku Chik Pante Kulu (Penyusun, 1969). Untuk mendukung proses belajar mengajar pada dayah tersebut, Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan fasilitas, seperti asrama, keperluan dasar, uang belanja bagi para santri dan gaji untuk dosen. Oleh kerana itu, diharapkan akan banyak calon mahasiswa yang berminat untuk menuntut ilmu di Dayah Tinggi ini (Ismail et al., 1995). Meskipun pemerintah memberikan pelbagai kemudahan bagi para mahasiswa, akan tetapi minat mereka kian hari kian menurun terhadap dayah tersebut.

Sejak pendiriannya sampai tahun 1975, dayah ini tidak mengalami perkembangan yang berarti sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut terutama disebabkan oleh beberapa hal, antara lain, yaitu: Pertama, Terputusnya hubungan dengan pendidikan pada peringkat rendah dan menengah sebagaimana lazimnya sebuah dayah terpadu, sehingga minat mahasiswa untuk memasuki dayah tersebut sangat terbatas. Di samping itu para lulusan dayah-dayah yang terdapat di Aceh kurang berminat untuk melanjutkan pendidikannya ke peringkat yang lebih tinggi. Sedangkan lulusan Sekolah Menengah Umum dan Agama cenderung melanjutkan pendidikan mereka ke Universitas Syiah Kuala atau ke IAIN Ar-Raniry.

Kedua, Dayah Manyang Teungku Chik Pante Kulu tidak memiliki pimpinan (Teungku Chik) yang bersedia duduk di dalam dayah manyang bersama dengan santrinya sebagaimana lazimnya tradisi dayah. Kesusahan untuk mendapatkan tenaga seperti ini telah menyebabkan tradisi kehidupan dayah susah untuk dikembangkan seperti yang diharapkan. Keadaan ini ditambah lagi karena daya tarik para santri tidak cukup kuat untuk masuk ke dayah ini, bahkan jumlah santrinya pun setiap tahun terus berkurang (Penyusun, 2007).

Untuk mempertahankan eksistensinya, maka Dayah Tinggi Teungku Chik Pante Kulu terpaksa merubah bentuknya menjadi Fakultas Syari'ah Teungku Chik Pante Kulu. Sejak tanggal 7 April 1985 dayah ini mendapat status terdaftar dari Kementerian Agama dan dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 219 tahun 1988, STIS (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah) ini telah diberi hak untuk mengelola Program pendidikan S-1 dengan penerapan sistem kredit semester (Ismail et al., 1995). Fakultas Syariah ini dipimpin oleh Teungku H. M. Daud Hasan dan Teungku Muhammad Yunus Yacobi. Sejak tahun 1988 Fakultas Syariah berubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah dan akhirnya sejak tahun 1998 Sekolah Tinggi Ilmu Syariah berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Teungku Chik Pante Kulu (Penyusun, 2007).

Setelah dayah manyang berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Teungku Chik Pante Kulu, maka tahap berikutnya dibukalah kursus jabatan Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) dalam rangka mengikuti perkembangan dan keinginan para calon mahasiswa. Pada tahun 2001 Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Teungku Chik Pante Kulu juga membuka Program Diploma II. Sampai saat ini STAI Yayasan Teungku Chik Pante Kulu telah memiliki program pendidikan S-1 dalam dua jabatan, masing-masing jabatan Ahwal al-Shakhshiyah (Syariah) dan Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah). Sedangkan pada Diploma II terdiri dari jabatan Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) dan jabatan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) (Penyusun, 2007).

#### **D. KESIMPULAN**

Sejarah berdirinya institusi pendidikan tinggi Agama Islam di Aceh sangat berkait rapat dengan tradisi pendidikan Islam di Aceh. Tradisi pendidikan Islam telah berlangsung sejak agama Islam mula datang ke daerah Aceh. Ada dua tradisi pendidikan Islam yang berperanan cukup signifikan bagi perkembangan pendidikan Islam di daerah Aceh, yaitu pendidikan dayah dan madrasah. Kedua tradisi pendidikan Islam ini memberikan peluang yang sama bagi lelaki dan wanita untuk dapat belajar pada institusi pendidikan tersebut.

Di samping itu, tradisi pendidikan dayah dan madrasah juga telah mendorong berdirinya institusi pendidikan tinggi Islam di Aceh. Untuk tradisi pendidikan madrasah telah berhasil mendirikan institusi pendidikan tinggi agama Islam sebagai pendidikan lanjutan setelah madrasah Aliyah. Institusi pendidikan tinggi agama Islam pertama yang ditubuhkan di Aceh adalah IAIN Ar-Raniry. Sedangkan tradisi pendidikan dayah telah berhasil mendirikan Dayah Teungku Chik Pante Kulu yang merupakan pendidikan lanjutan khusus bagi alumni dayah. Akan tetapi pada perjalanan selanjutnya Dayah Teungku Chik Pante Kulu tidak mengalami perkembangan yang berarti, sehingga diputuskan untuk mengubah dayah manyang ini menjadi institusi pendidikan tinggi agama Islam yang moden.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adil, M. (2019). Membangun Aceh Melalui Pendidikan (Studi Analisis Konsep KOPELMA Darussalam Ali Hasjmy). *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 1(2), 337–348. <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v1i2.19>
- Alkaf, M. (2019). *Nasionalisme Dari Pinggir*. Bandar Publishing.
- Berutu, A. G. (2016). Penerapan syariat Islam Aceh dalam lintas sejarah. *Jurnal Hukum*, 13(2), 163–188.
- Boland, B. J. (1985). *Pengumpulan Islam di Indonesia*, Terj. Safroeddin Bahar. Grafiti Pers.
- Daudy, A. (2006). *Syekh Nuruddin Ar-Raniry: sejarah hidup, kaya dan pemikiran*. P3KI.
- Hasballah, F. (1978). *Dwi Windu Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh*. Fakultas Tarbiyah Jami'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Ismail, B., Abdullah, A., & Hasyim, H. M. (1995). *Perkembangan Pendidikan Di Daerah Istimewa Aceh*. Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Istimewa Aceh.
- Muhajir, A. (2016). Politik Daud Beureueh Dalam Gerakan Di/Tii Aceh. *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 1–18.
- Penyusun, T. (1963). *Darussalam*. Yayasan Pembina Darussalam.
- Penyusun, T. (1969). *10 Tahun Darussalam dan Hari Pendidikan Aceh, Banda Aceh: , 1969*. Yayasan Pembina Darussalam.
- Penyusun, T. (1978). *15 Tahun IAIN Jami'ah Ar-Raniry*. Panitia Hari jadi ke 15 IAIN Jami'ah Ar-Raniry.
- Penyusun, T. (2003). *Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia*. Departemen Agama RI.
- Penyusun, T. (2004). *Profil IAIN Ar-Raniry Tahun 2004*.
- Penyusun, T. (2007). *Buku Panduan STAI-PTAI Yayasan Tgk. Chik Pante Kulu, Th 2007/2008*.
- Penyusun, T. (2009). *Buku Panduan Program S1 dan D3 IAIN Ar-Raniry Tahun Akademik 2009/2010*. IAIN Ar-Raniry.
- Putra, R. S., Putra, R. H., & RD, A. H. (2020). KONSEPSI IDEAL DARUSSALAM DALAM PERSPEKTIF A. HASJMY SEBAGAI PUSAT PENDIDIKAN ISLAM. *Jurnal Adabiya*, 22(2), 81. <https://doi.org/10.22373/adabiya.v22i2.8146>
- Rasyidah. (2008). *Potret Kesetaraan Gender di Kampus*. PSW IAIN Ar-Raniry.

- Rezki, G., Husaini, & Abdullah, T. (2017). Dinamika Kota Pelajar Mahasiswa (KOPELMA) Darussalam (1959-2015). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Syiah Kuala*, 2(2), 77–92. <https://doi.org/10.24815/JIMPS.V2I2.3770>
- Soelaiman, D. A. (2016). *Perihal Pendidikan dan Kebudayaan; Sebuah Otobiografi, Persembahan Pada Usia 78 Tahun*. Pusat Studi Melayu Aceh.
- Usman, A. R. (2001). *Kampus sebagai institusi pencerahan*. Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry.